

ANALISIS FAKTOR EKOLOGI TERHADAP ADMINISTRASI NEGARA DALAM TRANSFORMASI ADMINISTRASI MODERN

Fakhsiannor

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin

Email: fakhsiannor@gmail.com

Abstract

Administration as a science has a general nature and universal in the sense of having the same elements, wherever and whenever science of administration is set. But in fact, its found a wide variety and indication of administration that contained in some groups of society from one nation or among various nations. Growth in developing countries ecology administration since 1950, where the problem is the environment which has a variety of aspects that need establishing which aspects are relevant for system of state administration or the nationalities. Even in a system of state administration was still found subsystem administration of a group of society who came from thr territory of a certain country, seemingly there was a relationship of influence between administration of a part of the territory with the surrounding community, both the physical environment and community circles viewed from the science of biology, its an ecology that studies the relationship of reciprocal influence between the natural surroundings with a living organism.

Keywords: *ecology, modern administration, transpormation administration*

PENDAHULUAN

Sejauh ini di dalam studi administrasi negara terkandung beberapa macam sistem yang berbeda-beda dari masing-masing negara. Hal ini merupakan tema utama Perbandingan Administrasi Negara dan perbandingannya dengan negara lain. Pendekatan Perbandingan Administrasi Negara terkait erat, saling berhubungan, saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1995:54) dimana hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.

Berbagai aspek yang memiliki pengaruh terhadap administrasi negara diantaranya adalah faktor alam dan aspek ekologis yang dapat menentukan warna dan corak administrasi negara, sedangkan alam yang bukan hasil buatan manusia merupakan karunia Tuhan. Kemerdekaan suatu negara bisa diperoleh lewat perjuangan bangsa. Birokrasi pemerintahan merupakan upaya akal budi manusia. Akan tetapi masalah alam erat hubungannya dengan

kehendak pencipta, dan oleh karenanya banyak negara di dunia yang mengakui akan kebesaran penciptanya. Karena corak alam yang berbeda, sifat dan tingkat kekayaan alam merupakan ukuran sumber kekayaan negara, maka faktor alam ikut menentukan pula terhadap corak administrasi negara.

Hal tersebut penting dipahami karena posisi geografis negara yang strategis dapat menguntungkan bagi negara bersangkutan, sehingga bisa dijadikan alat pelestarian ekologi administrasi negara. Sisi lain bagi kepentingan studi perbandingan merupakan obyek dipandang yang berguna dan dapat dijadikan pelengkap komperatif bagi negara-negara ataupun daerah yang serupa.

Aspek ekologi kemasyarakatan mencakup sendi-sendi kehidupan bangsa, dimana ada banyak aspek kemasyarakatan yang dijumpai di negara-negara yang sama motifnya. Umpamanya dari segi politik di negara manapun ideologi negara itu dijumpai, dimana masalah motif politik tergantung pada ideologi negara itu sendiri.

Aspek lain seperti sistem perekonomian, sistem kebudayaan, sistem pertahanan akan menunjukkan pada pola kehidupan masyarakat suatu bangsa. Oleh karena itu adanya beberapa aspek kemasyarakatan yang berbeda-beda yang akan menimbulkan perbedaan ekologi administrasi dari negara-negara yang berlainan faktor kemasyarakatannya.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, kajian ekologi dan hubungannya dengan administrasi negara dalam proses transformasi ke administrasi modern, penulis mencoba melihat dari aspek-aspek ekologi administrasi negara dalam suatu kerangka teori, dan mengkaji pengaruh faktor ekologi terhadap transformasi administrasi modern.

ASPEK-ASPEK EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA

Pengertian ekologi menurut Pamudji (1993:65) dan Ukasah (1987:66) menyebutkan bahwa "ekologi" sebagai suatu ilmu yang merupakan cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara organisma hidup (*living organism*) dengan lingkungan dimana ia hidup dan berkembang.

Teori ekologi pada prinsipnya dapat diadopsi atau diterapkan dalam ilmu administrasi negara, dengan analogi bahwa administrasi negara sebagai "organisma" mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidup (*environment*) dimana administrasi negara itu tumbuh dan berkembang. Untuk keperluan analisis ekologi administrasi negara dapat diartikan sebagai seluruh elemen yang terdapat diluar batas-batas administrasi yang mempunyai potensi mempengaruhi sebagian ataupun administrasi secara keseluruhan.

Hubungan Sistem administrasi dengan ekologi dapat dijelaskan bahwa apabila kita membahas administrasi sebagai suatu sistem kegiatan (sistem administrasi negara sebagai sasaran studi), maka kita dihadapkan kepada konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem. Menurut Ukasah (1987:66) merupakan gagasan dari suatu sistem yang menganjurkan bahwa kita dapat memisahkan administrasi dari kegiatan-kegiatan

sosial yang lainnya, yang paling tidak untuk tujuan analisa. Dan memeriksa seakan-akan administrasi itu sendiri dikelilingi oleh lingkungannya, tetapi akan mudah dibedakan dari lingkungan tersebut dimana ia dioperasikan.

Dalam hubungan dengan ekologi administrasi negara, maka faktor lingkungan perlu dipilih, mana yang relevan dengan sistem administrasi negara, dimana faktor lingkungan hidup yang relevan merupakan faktor yang disebut sebagai faktor-faktor ekologis.

Sebagai salah satu fenomena administrasi, belakangan ini nampak adanya pandangan yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah di kebanyakan negara sedang berkembang, seperti diungkapkan Ginanjar Kartasmita, (1997:72). Pandangan Pertama melihat organisasi pemerintahan merupakan dewa penyelamat dan merupakan satu-satunya organ yang dikagumi masyarakat, ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengarahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan, sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin.

Pandangan kedua menganggap cara kerja aparatur pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan modernisasi dan orientasi pada pembangunan dan berperilaku kurang inovatif.

Secara teoritis lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari *normative-science* ke pendekatan *behavioral-ekologis*. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi, memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah untuk melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi (budaya, ekonomi, sosial, politik dan geografi), perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman suatu bangsa.

PENGARUH EKOLOGI TERHADAP TRANSFORMASI ADMINISTRASI NEGARA.

Sudah menjadi hukum dalam ilmu administrasi bahwa administrasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan saat sekarang ini yang sedang mengalami proses perubahan yang cepat. Lingkungan senantiasa berubah, namun perubahan yang sedang berlangsung berjalan dalam tempo yang lebih cepat. Perubahan ini berlangsung disemua aspek kehidupan, bersifat lintas sektoral dan lintas disiplin. Perubahan yang berlangsung secara global. Ia menyangkut perubahan yang amat mendasar yaitu perubahan nilai-nilai, bahkan universalisasi nilai-nilai. Perubahan sistem nilai masyarakat akan mempengaruhi pula terhadap perkembangan administrasi.

Sebagai salah satu masalah dalam administrasi pembangunan sebagaimana diungkapkan oleh Riggs (1996:100) dipengaruhi oleh tiga masalah yaitu masalah lingkungan fisik, lingkungan manusia dan lingkungan budaya. Para analis geopolitik mengatakan bahwa lingkungan fisik, geografi, iklim dan lokasi merupakan faktor determinan terhadap pembangunan. Pada suatu daerah tertentu doktrin administrasi yang cocok bagi pemerintah yang mengalami geopolitik tertentu, menjadi tidak relevan bagi pemerintahan di daerah yang memiliki geopolitik sendiri.

Sedang masalah lingkungan manusia dijelaskan bahwa karakteristik manusia membentuk kemampuan suatu sistem sosial dan sebaliknya karakteristiknya juga dapat diubah oleh sistem sosial. Dalam pengertian ini doktrin administrasi dapat ditentukan oleh demografi, biologi dan psikologis.

Jenis lingkungan ketiga adalah lingkungan budaya, dimana dengan adanya hubungan timbal balik antara administrasi pembangunan dengan lingkungan budaya dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pemaksaan dalam pembangunan administrasi. Sistem lingkungan budaya dapat saja menghambat pembangunan administrasi, akan tetapi tidak selamanya dapat mempersulit administrasi pembangunan. Yang lebih penting adalah informasi mengenai pengalaman suatu negara yang dengan pembangunan administrasinya mampu

mengatasi berbagai persoalan yang timbul karena perubahan budaya.

Lebih jauh dalam pembahasan lingkungan sistem administrasi negara, Pamudji (1993:14) berpendapat bahwa lingkungan sistem administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi sebagai perangsang administrator untuk berusaha dan sekaligus sebagai penerima hasil-hasil kerja. Disamping itu lingkungan administrasi memiliki faktor-faktor yang bersifat fisik alamiah dan faktor sosial kemasyarakatan. Lebih lanjut The Liang Gie (1992:22) dan Sondang P.Siagian (1995:27) menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak berlangsung dalam keadaan lepas dari lingkungannya, sebaliknya berlangsung dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan ini walaupun tidak termasuk administrasi tetapi berpengaruh ikut menentukan apakah suatu administrasi akan berhasil mencapai tujuannya atau tidak.

Adapun yang dimaksudkan dengan faktor fisik alamiah adalah lokasi dan posisi geografi, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk (yang diklasifikasikan kedalam Tri Gatra). Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor sosial kemasyarakatan adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (yang diklasifikasikan kedalam Panca Gatra).

Kemudian Fremont E.Kast dalam Syukur Abdullah (1990:117) mengemukakan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi berlangsungnya rangkaian kegiatan penataan antara lain : kebudayaan, teknologi, pendidikan, politik, hukum, kependudukan, sumber fisik, sosial dan ekonomi.

Hubungan antara sistem administrasi negara dengan ekologi sangat erat, dimana sistem administrasi negara dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi disekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk kedalam sistem administrasi. Menurut Pamudji (1993:194) mengatakan bahwa sistem administrasi negara berangkat dari suatu teori sistem bahwa adanya masukan (*input*), konversi (*conversion*) dan keluaran (*output*) serta umpan balik (*feed back*) yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut menegaskan bahwa sistem administrasi negara

adalah "Suatu proses dinamik yang berkelanjutan dan bersifat sekuler dimana masukan dikonversi menjadi keluaran, yang selanjutnya keluaran akan menjadi umpan balik sebagai masukan baru bagi konvensi baru untuk menghasilkan keluaran baru dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan pemerintah".

Faktor-faktor ekologi dalam hubungannya dengan sistem administrasi negara adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam proses sistem untuk dapat mengikuti proses melalui *input* ditransformasikan menjadi *output*.

Aspek Fisik Alamiah (Tri Gatra)

a. Pengaruh Faktor Lokasi dan Posisi Geografi.

Bentuk keadaan dan lokasi geografi suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan, pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Cara menjalankan administrasi negara akan berbeda pada suatu negara kepulauan, seperti Indonesia dan Philipina apalagi dibandingkan dengan negara India dan China (negara daratan). Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya.

Pengaruh lokasi dan potensi geografis terhadap sistem administrasi negara bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang diterapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. Misalnya Indonesia sebagai negara kepulauan akan menerapkan prioritas kebijakan kelautan dalam suatu sistem administrasi negara yang menjamin terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menjamin pengaturan kesejahteraan dan menjamin keamanan (*integritas*).

b. Pengaruh Keadaan Kekayaan Alam

Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga tidak ada negara yang kaya dan negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya dan dapat menimbulkan probelema hubungan internasional yang kompleks.

Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, sehingga membutuhkan administrasi negara yang menjamin azas lestari kekayaan alam dan azas daya saing pemanfaatan alam (faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik/administrasi, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat).

c. Pengaruh Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Pengaruh ini terhadap administrasi negara secara faktual bahwa manusia (penduduk) baik dari segi jumlah, komposisi maupun penyebarannya adalah faktor penentu apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan disuatu negara. Dengan kata lain manusia yang tinggal di suatu negara baik sebagai subyek maupun sebagai obyek akan menentukan apa yang dilakukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara.

Aspek Sosial Kemasyarakatan (Panca Gatra) meliputi :

a. Pengaruh Faktor Ideologi

Ideologi suatu negara akan berperan sebagai pedoman bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jika ideologi dianggap sebagai suatu nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar dalam memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai didalam administrasi negara baik secara struktural maupun *behavioral* yang pada dasarnya merupakan *refleksi* perwujudan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi (Pamudji, 1993:85)

b. Pengaruh Faktor Sistem Politik

Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Dengan berbagai indikasi tersebut dapat digambarkan lingkungan administrasi dalam bidang politik.

Politik diartikan sebagai azas, haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada ditangan pemerintah.

Karena administrasi negara merupakan proses lanjutan dari politik, maka politik administrasi negara yang harus pula merupakan lanjutan politik. Bagi administrasi negara misalnya, tidak ada netralitas politik karena politik harus seirama dengan politik negara.

Pada aspek kelembagaan dimana administrasi negara berada dibawah pimpinan pejabat-pejabat politik yang berorientasi pada Partai Politik tertentu (kasus Orde Baru), sehingga sering terjadi pembentukan suatu badan atau lembaga yang baru dibentuk dalam suatu kementerian, walaupun secara terselubung dilatarbelakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang Partai pada jabatan-jabatan yang baru dibentuk tersebut.

Dalam kondisi administrasi negara seperti itu, dimana lambat laun terciptanya struktur organisasi administrasi yang tidak efisien, dengan akibat adanya suatu organisasi yang tidak jelas tugas dan fungsinya, disamping terjadi *double job* dibebberapa organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama, dan birokrasi berlebihan yang dapat menghambat proses kerja dan penyalahgunaan wewenang (Pamudji, 1993:104)

c. Pengaruh Faktor Ekonomi

Pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka atau tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah; tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkatan pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenagakerjaan, tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut *The Liang Gie* (1992:28) dan wujud pengaruh ekonomi terhadap administrasi negara dapat dilihat pada kebijakan sistem ekonomi kekeluargaan (koperasi) yang

bagaimana administrasi dapat bekerja dengan berdasar pada tingkat taraf kehidupan rakyat yang sangat menentukan apa yang mereka dapat kerjakan, apa sifat disiplin kerja yang hendak dilaksanakan, sistem prioritas apa yang harus disusun, kesejahteraan sosial yang bagaimana yang harus dicapai serta pengarahan penggunaan sumber yang bagaimana yang harus disoroti, kesemua ini mempengaruhi terhadap sistem administrasi negara.

Sebagai perbandingan pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara Indonesia dan Amerika. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang mengutamakan kekeluargaan sementara sistem ekonomi Amerika adalah sistem ekonomi pasar.

Dengan demikian semua aspek-aspek administrasi negara Indonesia dipengaruhi oleh sistem ekonomi Pancasila, sementara Amerika Serikat dipengaruhi orientasi pasar (masing-masing pihak berusaha mencapai hasil maksimal dalam rangka *public policy*).

d. Pengaruh Faktor Sosial Budaya

Pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap administrasi negara dapat dilihat dari indikator yang telah dikembangkan dibidang pendidikan, seperti tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan diberbagai jenjang pendidikan; dibidang kesehatan seperti usia harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat; kehidupan keagamaan dibidang kependudukan seperti pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan menurut berbagai ukuran antara lain gender, usia dan sebagainya; perkembangan kelembagaan sosial budaya; serta aspek-aspek lain yang luas seperti nilai-nilai budaya tradisional dan modern, antara lain sikap terhadap (*etos*) kerja, kedisiplinan dan lain sebagainya.

Dalam hubungan sosial budaya dengan administrasi negara. Suatu hipotesa yang dapat dibuat dalam hubungan struktur masyarakat ialah bahwa proses administrasi lebih mudah dijalankan dalam suatu masyarakat yang heterogen menurut *The Liang Gie* (1992:30), dimana struktur masyarakat sebagai faktor ekologis dapat menentukan pula sifat dan ruanglingkup dari administrasi yang dapat dijalankan.

Bahwa aspek sosial budaya sangat *sensitif* dalam pergaulan masyarakat, maka sebagai pertimbangan dibutuhkan perwujudan sistem administrasi maupun administrasi negara yang dapat menampung terhadap permasalahan sosial budaya.

Sistem nilai budaya yang merupakan suatu rangkaian dari konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga, dan sebaliknya mengenai apa yang harus dianggap penting dan kurang berharga dalam hidupnya. Dari sistem nilai budaya ini terdapat pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang sekaligus merupakan pengatur, pengendali serta pemberi arah cara-cara bertingkah laku.

Sebagai masyarakat timur, maka bangsa Indonesia dikenal memiliki nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu kala. Nilai-nilai budaya ini ternyata bahkan masih bertahan dan diadopsi oleh organisasi formal seperti nampak pada penampilan birokrasi kita.

Nilai-nilai budaya pada umumnya semua suku bangsa di Indonesia yang berorientasi vertikal kearah atasan yang oleh Kontjaraningrat (2000:25) disebutkan bahwa nilai budaya lokal di Indonesia disamping beraspek negatif juga memiliki aspek positif yang dapat dikembangkan sebagai pendorong pembangunan bangsa termasuk pembangunan "*Birokrasi*".

Dimana dari aspek positif nilai budaya lokal yang diadopsi sebagai pendorong pembangunan birokrasi dalam kajian ini kita dapat melihat nilai-nilai budaya lokal suku Banjar.

Nilai budaya Banjar yang diadopsi dalam birokrasi pemerintahan seperti nilai kegotong royongan "*Kayuh Baimbai*" yang mencerminkan nilai utama dalam pembangunan administrasi adalah budaya kerja keras dan usaha yang bersikap jujur dan adil serta kebersamaan yang merupakan sikap dasar yang selalu berusaha mempertahankan martabat dan harga diri dan pola budaya yang dianut suku Banjar, dimana kalau ditransformasi kedalam administrasi modern, dia mempunyai nilai positif terhadap administrasi negara dalam dinamika global jika nilai budaya tersebut mampu memilih,

beradaptasi dan bersinergi positif terhadap perubahan.

Dimana menurut Inkeles (dalam Riggs 1996:14), bahwa manusia modern akan memiliki berbagai karakteristik antara lain: terbuka terhadap hal-hal baru, independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, percaya terhadap ilmu pengetahuan, memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi, serta memiliki rencana jangka panjang.

e. Pengaruh Faktor Keamanan

Mengingat bahwa ruanglingkup Hankam meliputi seluruh bidang kehidupan negara. Dimana aspek keamanan ini pengaruhnya terhadap administrasi negara dalam proses sangat ditentukan oleh tingkat jaminan kondisi keamanan.

Dimana ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keutuhan suatu bangsa dibidang pertahanan dan kemanan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang akan mengancam integritas dan kehidupan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam keadaan demikian dengan sendirinya administrasi negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam keadaan seperti itu biasanya yang berperan adalah administrasi darurat militer.

Dapat dikemukakan disini bahwa aspek-aspek Tri Gatra dan Panca Gatra sebagai faktor yang mempengaruhi administrasi negara baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana yang dikemukakan *Pamudji* (1993:120) nampak bahwa aspek tersebut bukan hanya berlaku di negara Indonesia, melainkan aspek yang universal yang mempengaruhi administrasi negara, walaupun isi dan materi yang dikandung dalam setiap aspek berbeda pada setiap negara.

KESIMPULAN

Dalam sistem administrasi negara, ia adalah sub sistem dari suatu supra sistem yang lebih luas yaitu lingkungan. Ia mempunyai batas-batas setiap yang dapat diidentifikasi, tetapi tidak dapat dimasuki batas-batas ini (lingkungan), mengubahnya dan mengendalikan keluarannya (*output*).

Dengan demikian kompleks dan dinamisnya administrasi negara, maka administrasi negara perlu mencurahkan lebih banyak perhatiannya kepada kekuatan-kekuatan lingkungan (*ekologi*).

Pemahaman mengenai pengaruh ekologi terhadap administrasi negara adalah sangat penting bagi penyelenggara negara. Prinsip-prinsip tertentu mengenai administrasi negara mungkin cocok untuk operasi-operasi dalam proses administrasi dalam suatu lingkungan yang relatif stabil.

Beberapa faktor ekologi yang sangat berperan mempengaruhi proses administrasi pada setiap negara adalah faktor lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk (fisik alamiah). Sementara faktor yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum dan pertahanan keamanan.

Pemerintah yang mempunyai kemampuan administrasi maju dapat mengatasi masalah lingkungan fisik dan lingkungan non fisik yang kurang menguntungkan, tetapi karena keterbatasannya tentu tidak dapat mengatasi keduanya.

Berdasarkan pandangan mengenai pembangunan, dapat dikatakan bahwa sistem yang lebih maju adalah sistem yang mampu mengatasi berbagai hambatan lingkungan lebih efektif. Artinya, ketika suatu lingkungan memiliki suatu masalah yang sukar dipecahkan, sistem yang kurang maju akan kewalahan. Sebaliknya sistem yang telah maju memiliki kemampuan merubah lingkungannya kearah lebih mapan. Kemampuan yang besar akan mendorong pertumbuhan. Akibatnya terlihat adanya transformasi. Lingkungan yang telah di ubah juga akan mendukung berbagai keinginan manusia sekaligus kurang menjadi hambatan bagi pembangunan itu sendiri.

REFERENSI

Bintoro Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja A.R. 1996. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*, Penerjemah Suryatim. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.

Fred. W. Ringgs (ed). 1996. *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 1996. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 1996. *Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatic*. Rajawali. Jakarta

Handyaningrat Soewarno. 1996. *Pengantar Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Antropologi*. Aneka Cipta. Jakarta.

S. Pamudji. 1993. *Ekologi Administrasi Negara*,. Bina Aksara. Jakarta.

Syukur Abdullah. 1996. *Bungai Rampai Administrasi Pembangunan*. Unhas. Makassar.

Sukarna. 1990. *Administrasi Negara Perbandingan Jilid 1, 2 dan 3*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

-----, 1985. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. PT. Gunung Agung. Jakarta.

The Liang Gie. 1992. *Administrasi Perkantoran Modern*, Edisi ke-4. Liberty. Yogyakarta.

Ukasah. 1987. *Perbandingan Administrasi Negara*. Nova. Bandung.